



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Indonesian Treasury



DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

KASP ONLINE DISCUSSION PELUANG DAN TANTANGAN AKUNTAN SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Fahma Sari Fatma, SE. AK. MSE. CA

Koordinator Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Akuntan Sektor Publik pada Pemerintah Pusat dan BLU

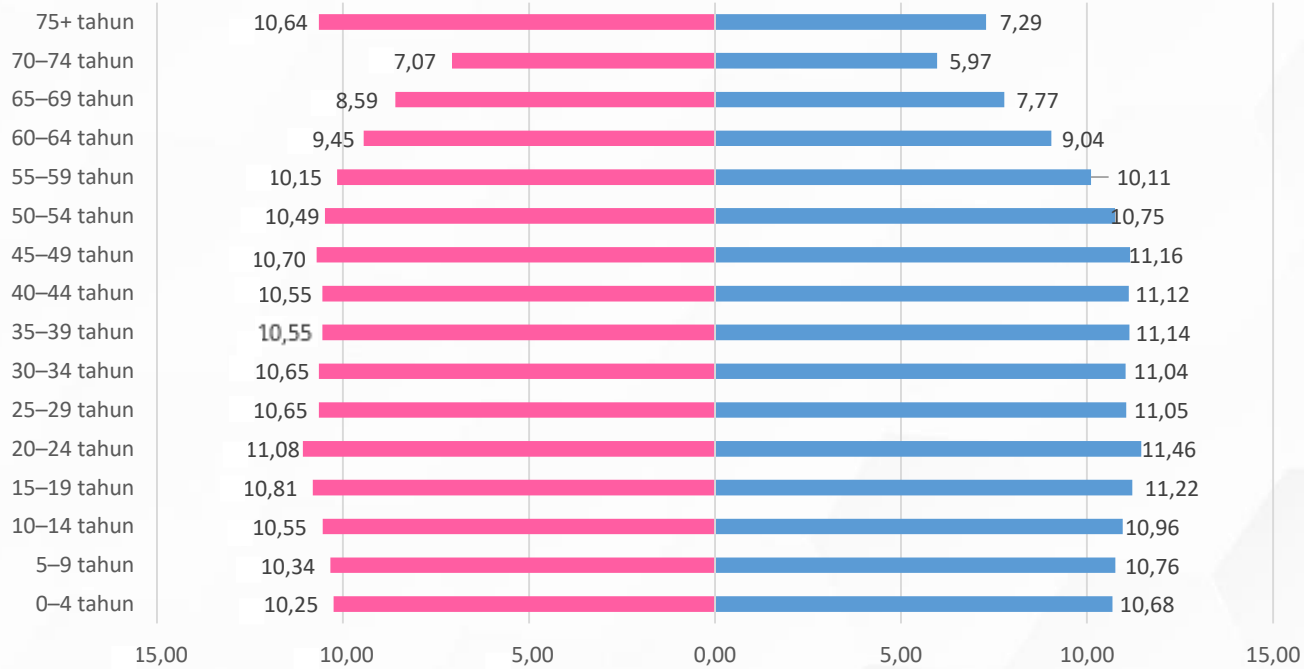
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan



Jakarta, 14 November 2023



Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 2045



Sumber : bps.go.id (data diolah)

■ Laki-Laki ■ Perempuan

Persentase & Jumlah

Sebanyak hampir

70%

Jumlah Penduduk Indonesia
berada dalam usia produktif
15-64 tahun

Diperkirakan

213,18 Juta

Jumlah Penduduk Indonesia
berada dalam usia
produktif



Pada tahun 2045 diperkirakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana 70% jumlah penduduk Indonesia berada dalam usia produktif yaitu 15-64 tahun



Kesempatan, potensi dan peluang turut serta dan mengambil peran dalam mewujudkan impian bangsa menjadi negara maju serta mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA & TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT



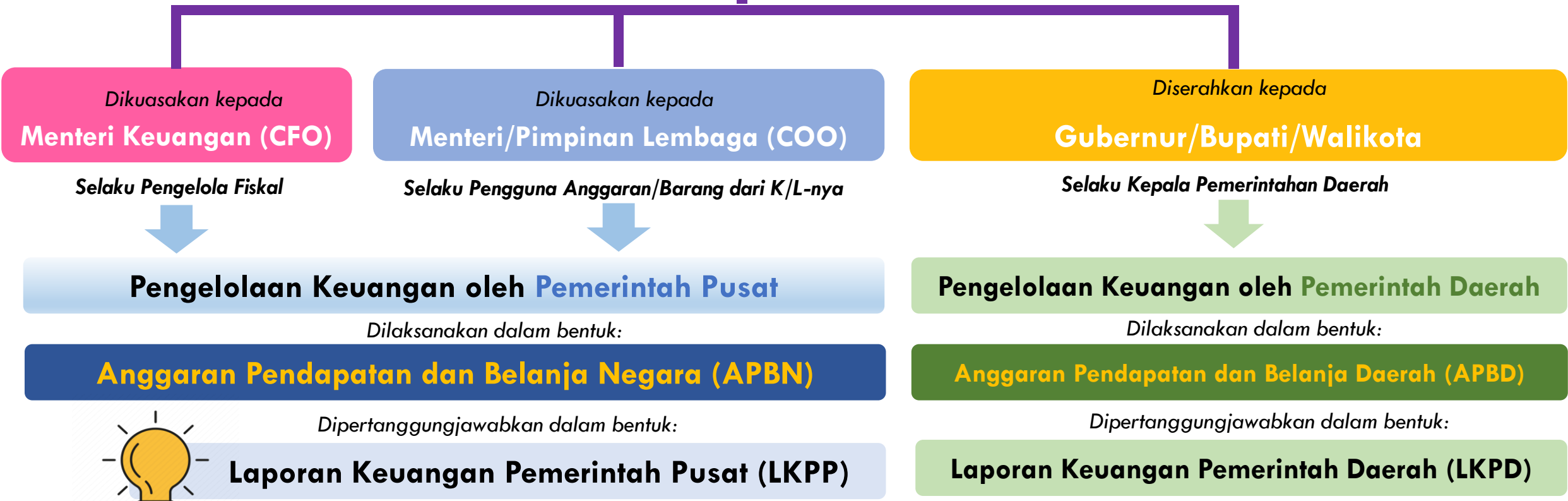
NKRI dipimpin oleh:

Presiden (CEO)

“Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden, kemudian:

Pasal 6 ayat (1) – UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Pusat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dilaksanakan dalam bentuk:

Dilaksanakan dalam bentuk:

Dipertanggungjawabkan dalam bentuk:

Dipertanggungjawabkan dalam bentuk:

LKPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIKLUS APBN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.



Peran Akuntan Sebagai Penyusun Kebijakan Akuntansi dan Laporan Keuangan

1. Membantu pelaksanaan tugas Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga **(UU 17 2003 dan UU 1 2004)**.
2. Membantu pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menyusun:
 - a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara **(UU 17 2003)**
 - b. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara **(UU 17 2003 dan UU 1 2004)**.
3. Membantu pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat **(UU 17 2003)**.

Peran Akuntan Sebagai Pemeriksa

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

(UU 15 Tahun 2004)



1

Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Akuntan profesional di lingkungan pemerintahan memiliki peluang untuk berkontribusi dalam menghadirkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.



2

Disrupsi Teknologi Dan Transformasi Digital

Beragam otomasi, digitalisasi, artificial intelligence, advanced data analysis dan berbagai perkembangan lain menjadi peluang bagi generasi muda yang memahami teknologi dan mempunyai kemampuan analisis dan berpikir strategis di lingkungan pemerintahan. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk mengakses, menganalisa, dan memanfaatkan informasi dalam *Big Data* dalam pengambilan keputusan yang berkualitas.



3

Pengukuran Kinerja dan Efektivitas Program

Akuntansi pemerintahan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengukuran kinerja dan efektivitas program pemerintah. Dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan yang relevan, akuntan profesional di lingkungan pemerintahan dapat mengevaluasi apakah tujuan dan sasaran program telah tercapai.



4

Kolaborasi dengan Swasta

Pengelolaan aset publik dengan *mekanisme creative financing* seperti KPBU memberikan peluang akuntan profesional di lingkungan pemerintahan untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam menyediakan layanan akuntansi dan audit yang lebih efisien dan terintegrasi.



5

Dunia Yang Semakin Global

Perkembangan dunia yang semakin global serta operasi bisnis yang berlangsung antar negara menjadi peluang bagi akuntan untuk memahami standar internasional sehingga dapat bekerja dengan baik pada lingkungan global.



TANTANGAN AKUNTAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH



1

Vuca (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)

Era dimana terjadi perubahan yang sangat cepat), penuh ketidakpastian, kerumitan dan ketidakjelasan



2

Kompleksitas Struktur Organisasi

Lembaga pemerintahan memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdiri dari banyak entitas. Hal ini menjadi tantangan dalam proses konsolidasi laporan keuangan dan penilaian kinerja keuangan Pemerintah secara keseluruhan.



3

Sumber Daya yang Terbatas

Sebagian besar lembaga pemerintahan menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan secara efisien dan tepat waktu.



4

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perangkat dibawahnya yaitu Sistem Akuntansi, Kebijakan Akuntansi, dan Petunjuk Teknis Akuntansi, berbeda dari standar akuntansi sektor swasta. Ini memerlukan pemahaman mendalam dan pelatihan khusus bagi para akuntan pemerintahan.



5

Pengelolaan Aset Publik

Penyediaan aset publik oleh pemerintah, seperti infrastruktur dan fasilitas pelayanan, merupakan tantangan tersendiri karena nilainya yang besar dan pengaruhnya terhadap pelayanan masyarakat.



1

Meningkatkan pemahaman terkait perkembangan teknologi terkini dan membantu instansi tempat bekerja membangun respons strategis.

2

Meningkatkan kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memanfaatkan informasi dalam *Big Data* untuk pengambilan keputusan yang berkualitas bagi instansi tempat bekerja

3

Meningkatkan kemampuan untuk menilai dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap proses akuntansi, termasuk terkait risiko yang timbul serta langkah-langkah mitigasinya.

4

Meningkatkan pemahaman perkembangan dari bentuk transaksi keuangan dan pelaporannya pada saat model bisnis menjadi digital (memanfaatkan platform digital).

5

Memanfaatkan kolaborasi dan sinergi sebagai cara kerja, baik dengan sesama pengelola keuangan pemerintah pusat, pengelola keuangan pemerintah daerah, swasta, Lembaga internasional bahkan melakukan *link and match* dengan dunia Pendidikan

6

Tidak hanya *hard skill* akuntan juga harus mengoptimalkan perannya dengan meningkatkan *soft skill* yang berfokus pada:

- Nila-nilai profesional dan etika
- Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.
- Komunikasi yang asertif namun empati.
- Pengelolaan/ manajemen perubahan.
- Cara berpikir kritis dan inovatif.

Termasuk memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat pada organisasi dan menjadikan tantangan sebagai dorongan untuk berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah

7

Mampu memahami dengan baik standar akuntansi internasional sehingga dapat bekerja dengan baik pada lingkungan global. Terus mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan untuk memperbaharui pengetahuan terkini agar dapat menangani tantangan yang sulit diprediksi.



Terima Kasih